

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Achmad Ruslan. 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Adrian Sutedi. 2018. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djafar Saidi dan Eka Merdekawati. 2022. *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*. Cet. VIII. Depok: Rajawali Pers.
- H.A.W. Widjaja. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.M Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda (Otonomi Daerah Dan Implikasinya)*. Yogyakarta: Total Media.
- Hendra Karianga. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Depok: Kencana
- Irwansyah. 2020. *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Marbun, SF. 2001. *Pokok-Pokok Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ninik Maryanti dan Basri Salipi. 2008. *Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Bina Aksara.
- Philippus M. Hadjon, et. al. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2017. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Samsul Wahidin. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah: Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sri Hartini, et. al. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaukani, et. al. 2005. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ainie Abdullah. 2005. *Dilema Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Lipi Pres, AIPI.



B. Skripsi dan Tesis

Rahmad Arif Rivaldi. 2021. *Kedudukan Tenaga Honorer Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sarolangun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.

Tia Septiana. 2023. *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Upah Tenaga Honorer Terhadap Kesejahteraan Pekerja (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah)*. Tesis Hukum Ekonomi syari'ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.

C. Jurnal

Achmad Fauzi. 2019. *Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik*. Jurnal Spektrum Hukum. Volume 16 Nomor 1. Universitas 17 Agustus. Surabaya.

Ahmad Gelora M. 2022. *Rekonstruksi Politik Hukum Pengaturan Asn Dalam Sistem Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 11 Nomor 2. UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Tulungagung.

Amelia Martira dan Harsanto Nursadi. 2020. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional*. Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Volume 1 Nomor 1. Depok.

Betanika Nirbita dan Sri Hardianti. 2020. *Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2019*. Jurnal Riset Akuntansi Perpajakan. Volume 7 Nomor 2. Universitas Pancasila. Jakarta.

Bima Syafruddin Ritonga dan Beby Masitho Batubara. 2021. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik. Volume 3 Nomor 2. Universitas Medan Area. Medan.

Budi Susanto dan Khrisna Djaya. 2022. *Pemenuhan Hak Hukum Kepegawaian Bagi Non Pns Yang Bekerja Di Lingkungan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum: Alethea. Volume 5 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.



- Etwar Hakumala. *et. al.* 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Pattimura. Maluku.
- Kamilaus Konstanse. 2020. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bel.* Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 5 Nomor 2. FED Universitas Timor. NTT.
- Komang Ayu Ani Savitri, *et. al.* 2019. *Analisis Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Ketidaktepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Volume 9 Nomor 1. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.
- Lia Juhriah dan Dematria Pringgabayu. 2020. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.* Journal of Accounting Taxing and Auditing. Volume 1 Nomor 2. Universitas Mitra Indonesia. Lampung.
- Mochamad Muslich Haji Sodiq. 2021. *Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian.* Jurnal Cakrawala Hukum. Volume 12 Nomor 1. Universitas Merdeka. Malang.
- Nurwita Ismail. 2019. *Kewenangan Dekonsentrasi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah* Gorontalo Law Review. Volume 2 Nomor 1. Gorontalo.
- Retno Ade Widya Ningsih, *et. al.* 2023. *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Status Dan Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau).* IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Volume 4 Nomor 1. Bunda Media Grup.
- Safitta Amanah, *et. al.* 2022. *Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum.* Jurnal Pro Hukum Volume 11 Nomor 4. Universitas Gresik. Gresik.
- Suverius Dhuri Mbipi, *et. al.* 2020. *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah.* AFREE Accounting and Financial Review. Volume 3 Nomor 2. Universitas Merdeka Malang. Malang.
- Tri Suhendra Arbani. 2019. *Penggunaan Dan Batasan Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia.* Jurnal Widya Pranata Hukum. Volume 1 Nomor 2. Fakultas Hukum Univ. Widya. Mataram.
- Uly Siregar, *et. al.* 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.* Jurnal Lex Administratum. Volume 9 Nomor 1. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Iulan Handini dan Danang Risdiarto. 2020. *Problematika Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian*



- Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah.* Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 17 Nomor 4. Jakarta.
- Yesti Mutia Basri. 2021. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Volume 6 Nomor 1. Universitas Airlangga. Surabaya.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Peraturan Daerah Kab. Soppeng No. 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kab. Soppeng No. 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023



E. Sumber Internet

Agung Pramono. 2023. *333 Honorer Satpol PP Soppeng Menjerit 3 Bulan belum Gajian*. Detiksulsel. diakses pada 27 September 2023.

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6937230/333-honorer-satpol-pp-soppeng-menjerit-3-bulan-belum-gajian>.

Dpr.go.id. 2023. *Guspardi : Revisi UU ASN Beri Jaminan kepada 2,3 Juta Tenaga Honorer*. diakses pada Kamis. 2 November 2023.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45721/t/Guspardi+%3A+Revisi+UU+ASN+Beri+Jaminan+kepada+2%2C3+Juta+Tenaga+Honorer>

